**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Konsep Kesejahteraan Sosial**
2. **Pengertian Kesejahteran Sosial**

Kesejahteraan sosial merupakan susatu keadaan sejahtera baik secara materil, spiritual dan kehidupan sosialnya yang dimiliki masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya tanpa melakukan penyimpangan sosial. Adapun definisi kesejahteraan social menurut Midgley (1995;5) dikutip dalam Adi (2018;4) yaitu: “Suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan social dapat dimaksimalkan”.

Definisi di atas menunjukan bahwa kesejahteraan sosial merupan suatu kondisi dimana segala permasalahan dapat diatasi dengan baik dan segala kebutuhan dapat terpenuhi serta dapat memanfaatkan dan memaksimalkan kesempatan sosial yang ada. Adapun definisi kesejahteraan sosial lainnya menurut Friedlander (1980;9) dikutip dalam Fahrudin (2014) yaitu:

Kesejahteraan Sosial adalah system yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan intsitusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Definisi di atas menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan system dari pelayanan sosial yang digunakan untuk mencapai peningkatan standar hidup serta kesehatan yang mendukung dan memiliki hubungan yang baik dengan lingkungannya agar dapat mencapai keberfungsian sosial dan dapat mengembangkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan baik secara personal, keluarga, maupun masyarakat.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dijelaskan dalan Undang-Undang No.11 Tahun 2009 yang dikutip dalam Fahrudin (2014:10) bahwa “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi dimana individu, kelompok, serta masyarakat dapat memenuhi kebutusan dasarnya seperti kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. Kebutuhan rohani seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan rohani seperti ibadah, bersosialisasi dengan individua tau masyarakat, cinta dan kasih sayang, serta mendapatkan rasa aman dan nyaman. Kebutuhan sosial dalam hal ini adalah dimana individu mampu melaksanakan peran didalam masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun definisi Kesejahteraan sosial menurut Suharto (2014:1) menjelaskan bahwa :

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Definisi diatas menyatakan bahwa kesehateraan sosial digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan sebuah kualitas hidup melalui kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang diselenggarakan oleh lemabaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial serta mencapai peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat yang lebih baik lagi.

1. **Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan sebuah kualitas hidup melalui kegiatan-kegitan yang terorganisir yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial serta mencapai peningkatan kualitas hidup individu,kelompok dan masyarakat yang lebih baik lagi. Untuk mencapai kondisi yang sejahtera bagi individu, kelompok maupun masyarakat, harus memahami terlebih dahulu apa itu tujuan dari kesejahteraan sosial tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Fahrudin (2014:10) bahwa tujuan dari kesejahteraan sosial yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khusunya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Tujuan dari kesejahteraan sosial ialah tercapainya kondisi yang sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, perumahan, dan pangan yang menjadi kebutuhan dasarnya, serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.

1. **Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial merupakan unsur penting untuk mengembalikan keberfungsian sossial individu, kelompok dan masyarakat agar dapat berperan serta menjalankan fungsi-fungsi sosial didalam lingkungannya. Menurut Fahrudin (2012:12) menjelaskan bahwa fungsi-fungsi kesejahteraan sosial antara lain:

1. Fungsi Pencegahan *(preventive)*

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

1. Fungsi Penyembuhan *(curative)*

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

1. Fungsi Pengembangan *(Development)*

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

1. Fungsi Penunjang *(Supportive)*

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Meninjau kutipan diatas bahwa adanya fungsi dalam kesejahteraan sosial yaitu untuk membantu individu, kelompok Maupin masyarakat agar mereka terhindar dari permasalahan-permasalahan dilingkungan sosialnya serta dapat berfungsi kembali dengan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial.

1. **Komponen Kesejahteraan Sosial**

Semua kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan lain:

1. Organisasi Formal

Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/badan sosial yang formal pula. Kegiatan yang dilaksankan memperoleh pengakuan masyarakat karena memberikan pelayanan secara teratur, dan pelayanan yang diberikan merupakan fungsi utamanya.

1. Pendanaan

Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab masyarakat. Mobilisasi dana dan sumber (*fund raising*) merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan kesejahteraan sosial karenanya tidak mengejar keuntungan semata-mata.

1. Tuntutan Kebutuhan Manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.

1. Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara professional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematik, dan menggunakan metoda dan tektik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

1. Peranserta Masyarakat

Usaha kesejahteraa sosial harus melibatkan peranserta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat.

1. Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

1. **Bidang-Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Secara substantif bidang kesejahteraan sosial atau bias juga disebut bidang usaha kesejahteraan sosial atau pelayanan sosial atau juga disebut sebagai praktik pekerjaan sosial, terdiri dari berbagai cakupan yang saling terkait era tantara lain:

1. akesejahteraan anak dan keluarga,
2. kesejahteraan remaja dan generasi muda,
3. kesejahteraan orang lanjut usia,
4. pelayanan kesejahteraan sosial umum (*public social welfare services*),
5. pelayanan rekreasional,
6. pelayanan sosial koreksional,
7. pelayanan kesehatan mental,
8. pelayanan sosial medis,
9. pelayanan sosial bagi penyandang cacat,
10. pelayanan sosial bagi wanita,
11. pelayanan sosial perumahan dan lingkungan.

Jika mengikuti pembidangan dalam praktik pekerjaan sosial (dan ini yang paling biasa digunakan dalam literatur pekerjaan sosial) maka bidang-bidang tersebut antara lain sebagai berikut:

1. pekerjaan sosial dengan anak dan keluarga,
2. pekerjaan sosial dengan remaja,
3. pekerjaan sosial dengan orang lanjut usia,
4. pekerjaan sosial dengan public/masyarakat,
5. pekerjaan sosial koreksional,
6. pekerjaan sosial medis,
7. pekerjaan sosial dengan penyandang cacat,
8. pekerjaan sosial sekolah,
9. pekerjaan sosial industry/pkerjaan (*occupational social work*),
10. pekerjaan sosial wanita (*feminist social work*),
11. pekerjaan sosial keluarga berencana,
12. pekerjaan sosial dengan narkotika dan HIV/AIDS,
13. pekerjaan sosial psikiatri,
14. pekerjaan sosial dan kesehatan mental,
15. pekerjaan sosial dengan organisasi,
16. dan masih banyak penyebutan/pembidangan pekerjaan sosial yang lai.
17. **Usaha Kesejahteraan Sosial**

Usaha kesejahteraan sosial secara umum bisa diebut juga sebagai pelayanan sosial seperti yang dikemukakan oleh Friedlander dikutip dalam Fahrudin (2014;15) yaitu:

Kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan dan penyempurnaan sumber-sumber manusia dan kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan, rekreasi, perlindungan buruh dan perumahan.

Definisi lain mengenai usaha kesejahteraan sosial menurut Jones (1990) dalam Soeharto (2014;8) yaitu: “tujuan utama kesejahteraan sosial yang pertama dan utama adalah penanggulangan kemiskinan dalam berbagai manifestasinya”. Makna tersebut tidak hanya merujuk pada kemiskinan fisik saja, seperti rendahnya pendapatan atau rumah tidak layak huni, melainkan pula mencakup berbagai bentuk masalah sosial lainnya yang terkait dengannya, seperti anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia, pelacuran, termasuk didalamnya menyangkut masalah kebodohan keterbelakangan serta kapasitas dan efektivitas lembaga-lembaga pelayanan sosial yang terlihat penanggulangan kemiskinan.

1. **Konsep Pekerjaan Sosial**
2. **Definisi Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial adalah ilmu yang memfokuskan intervensinya terhadap interaksi antar manusia dengan lingkungannya, manusia pasti sangat berhubungan erat dengan lingkungan yang ada, di lingkungannya tidak menutup kemungkinan juga terdapat ketidak cocokan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya, pekerja sosial dapat mengintervensi masalah tersebut agar manusia yang bersangkutan dapat menyelesaikan masalahnya serta mencapai tingkat kesejahteraan sosial yang setinggi-tingginya. Definisi pekerjaan sosial menurut studi kurikulum yang disponsori oleh *the Council on Social Work Education* dalam tahun 1959 dalam Fahrudin (2012:59) dinyatakan bahwa:

Pekerjaan sosial berusaha untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok, dengan kegiatan-kegiatan yang dipusatkan pada hubungan-hubungan sosial mereka yang merupakan interaksi antara orang dan lingkungannya. Kegiatan-kegiatan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi: pemulihan kemampuan yang terganggu, penyediaan sumber-sumber individu dan sosial, dan pencegahan disfungsi sosial.

Berdasarkan definisi diatas bahwa pekerjaan sosial merupakan profesi yang membantu individu-individu atau kelompok untuk memperbaiki keberfungsian sosialnya melalui kegiatan dengan melakukan interaksi sosial satu sama lain. Sehingga hubungan interaksi sosial mereka dengan ligkungannya dapat terjadi dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini diharapkan dapat membantu memulihkan kemampuan individu yang terganggu, menyediakan sumber-sumber yang ada serta mencegah terjadinya disfungsi sosial. Selain itu, adapun definisi pekerjaan sosial menurut Soetarso dalam Huraerah (2011:39) bahwa:

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi pemberian bantuan yang dilaksanakan melalui pengembangan interaksi timbal balik yang saling menguntungkan antara orang lain dan lingkungan sosialnya untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan orang tersebut sebagai suatu kesatuan harmonis yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Definisi diatas mengemukakan bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu profesi yang memberikan bantuan melalui pengembangan-pengembangan interaksi sosial yang memiliki hubungan timbal balik antara satu sama lain, yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup individu, kelompok maupun masyrakat dalam suatu kesatuan yang harmonis.

1. **Tujuan Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial pada dasarnya bertujuan untuk dapat memberikan bantuan kepada individu, kelompok maupun masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dan juga membantu mengembalikan keberfungsian sosial yang lebih baik. Menurut *The National Association Of Social Workers* (NASW) dalam Huda (2009:15) awalnya pekerja sosial mempunyai 4 tujuan utama, namun *The Council On Social Work Education* menambah 2 tujuan pekerjaan sosial sehingga menjadi 6, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya, menaggulangi dan secara efektif dapat menjalankan fungsi sosialnya,
2. Menghubungkan klie dengan jaringan sumber yang dibutuhkan,
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial dalam pelayanannya agar berjalan secara efektif,
4. Mendorong terciptanya keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial yang berpihak,
5. Memberdayakan kelompok-kelompok rentan dan mendorong kesejahteraan sosial maupun ekonomi,
6. Mengembangkan dan melakukan uji keterampilan atau pengetahuan professional.
7. **Fungsi Pekerjaan Sosial**

Seorang Pekerja sosial dalam melakukan tugas professional dan pelayanannya tentunya akan berfokus pada klien yang sedang ditanganinya. Adapun fungsi-fungsi dasar pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh Iskandar (1993:30), yaitu:

1. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat system kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Didalam fungsi ini dilakukan melalui upaya pelayanan sosial, perencanan kesejahteraan sosial, perbaikan dan pemeliharaan penghasilan, administrasi kesejahteraan sosial dan aksi sosial.
2. Menjamin standar subsistensi kesehatan dan kesejahteraan yang memadai bagi warga yang mencakup tugas-tugas pekerjaan sosial.
3. Membantu orang agar dapat berfungsi secara optimal di dalam institusi sosial maupun statusnya.
4. Menopang dan memperbaiki tata tertib sosial dan struktur kelembagaan sosial.

Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa pekerja sosial merupakan pelayanan pertolongan professional yang tugas utamanya yaitu menolong orang-orang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial seseorang. Tugas utama ini membedakan profesi pekerjaa sosial dengan pertolongan lainnya di dalam system kesejahteraan.

1. **Peranan Pekerjaan Sosial**

Pekerja sosial memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu klien dalam penyesuaian masalahnya untuk mencapai keberfungsian sosialnya sebagai suatu kewajiban dari sebuah profesi pekerjaan sosial. Menurut Sukoco (2011:22) menyatakan peranan pekerjaan sosial adalah:

1. Sebagai pemercepat perubahan (*enabler*)

Sebagi enabler, seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses system sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar masalah dapat teratasi sehingga kebutuhannya terpenuhi.

1. Peran sebagai perantara (*broker*)

Peran sebagai perantara yaitu menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat, lemabaga pelayanan dalam hal ini meliputi: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan.

1. Pendidik (*educator*)

Dalam menjelaskan peran sebagai pendidik, community worker diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudak diterima oleh individu, kelompok, dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.

1. Tenaga ahli (*expert*)

Berkaitan sebagai tenaga ahli (expert), pekerja sosial dapat memberikan masukan-masukan, saran, serta dukungan informasi didalam berbagai area (individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat).

1. Perencana Sosial (*Social Planner*)

Seorang perencana sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok dan masyarakat, menganalisa dan menyajikan alternative tindakan yang rasional dalam mengakses system sumber yang ada untuk mengatasi masalah-masalah pemenuhan kebutuhan individu, kelompok serta masyarakat.

1. Fasilitator

Pekerja Sosial sebagai fasilitator, dalam peran ini berkaitan dengan menstimulasikan atau mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan individu, kelompok dan masyarakat. Menjadi kualitas untuk bertindak dan menolong sepanjang proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

1. **Tahap-tahap Intervnsi Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial pada dasarnya bertujuan untuk menolong individu, kelompok serta masyarakat yang miliki masalah-masalah yang dihadapinya, melalui perbaikan pemenuhan kebutuhan dasar maupun pelayanan sosial. Pekerjaan sosial di lembaga merupakan suatu profesi dari berbagai profesi yang ada di lembaga. Pekerjaan sosial juga memiliki tugas yang bersifat sebagai panutan dan alat penghubung,bukan hanya masalah yang terkait dengan remaja dan lembaga rehabilitasi sosial. Adapun Intervensi pekerjaan Sosial menurut Iskandar (2013:65) adalah sebagai berikut:

1. Tahap *Engagement, Intake,* dan Kontrak

Tahap ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, dengan demikian terjadilah proses saling mengenal dan tumbuhnya kepercayaan klien kepada pekerja sosial. Pada akhirnya dapat dibuat suatu kontrak antara pekerja sosial dengan klien.

1. Tahap *Assesment*

*Assesment* merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah yang meliputi: bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, factor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah terdahulu yang pernah dilakukan klien (hasil dan kegagalannya), kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan itu semua maka dapatlah ditetapkan fokus atau akar masalah klien. Dalam tahap assessment ini pekerja sosial dapat menggunakan Teknik-teknik wawancara, observasi, dan Teknik pengumpulan data lainnya yang dianggap tepay.

1. Tahap membuat perencanaan intervensi

Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memcahkan masalah klien. Rencana intervensi disusun dan dirumuskan berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan sebelumnya oleh pekerja sosial. Garis besar renaca intervensi meliputi:

1. Faktor/akar masalah
2. Tujuan pemecahan masalah klien serta indicator-indikator keberhasilannya,
3. Sistem dasar praktik, yang meliputi system klien, system sasaran, system pelaksanaan kegiatan, dan system kegiatan,
4. Pokok-pokok program kegiatan pemecahan masalah,
5. Metode-metode pertolongan yang digunakan untuk memberikan pertolongan kepada klien.
6. Tahap Melaksanakn Program

Berdasarkan rencana intervensi diatas, maka selanjutnya pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien. Dalam pelaksanaan pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap tahapan.

1. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan pertolongan yang telah dilakukannya untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalannya atau hambatan-hambatan yang terjadi.

1. Tahap Terminasi (pengakhiran/pemutusan kegiatan pertolongan)

Tahap terminasi adalah tahap yang dilakukan bilamana tujuan pertolongan dicapai atau bilamana terjadi kegiatan referral atau bilamana karena alasan-alasan rasional kline meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya factor-faktor external yang dihadapi pekerja sosial atau karena lebih baik dialihkan kepada lembaga-lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten.

1. **Fokus Intervensi Pekerjaan Sosial**

Fokus intervensi pekerjaan sosial pada umumnya ditujukan kepada individu, namun hal ini bisa berubah disesuiakan dengan situasi dan kondisi yang terjadi, adakalanya seorang pekerja sosial memfokuskan intervensi tehadap kelompok maupun masyarakat untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya. Adapun pengertian intervensi menurut Alamsyah (2015:173) yaitu:

Intervensi dapat diartikan sebagai suatu cara atau strategi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat (individu, kelompok, masyarakat) untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang melalui pengembalian keberfungsian sosialnya supaya dapat menjalani kehidupannya secara mandiri.

Dari definisi yang telah dipaparkan diatas, intervensi merupakan suatu cara atau strategi yang dilakukan oleh pekerja sosial di dalam proses pertolongan terhadap klien baik itu individu, kelompok, dan masyarakat. Intervensi yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan serta memunculkan sikap kemandirian pada masyarakat itu sendiri. Adapun kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh seorang pekerja sosial dalam melakukan intervensi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pekerja sosial sebagai agen perubahan ditutuntut untuk mampu menguasai dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial ketika melakukan praktik pekerjaan sosial di dalam lembaga, maupun ketika terjun langsung di dalam lingkungan masyarakat.

1. Keterampilan (*Skill*)

Seorang pekerja sosial harus mampu mengaplikasikan kemampuannya secara maksimal dengan cara menganalisis apa yang menjadi hambatan serta apa yang menjadi kebutuhan klien baik itu individu, kelompok, maupun masyarakat.

1. Nilai (*value*)

Nilai disini dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap bak dan buruk ataupun mengenai apa yang di inginkan dan tidak di inginkan oleh seseorang, dalam hal ini seorang pekerja sosial harus cermat dalam menyikapi nilai-nilai atau norma maupun budaya yang dianut oleh klien.

1. **Konsep Tentang Masalah Sosial**
2. **Pengertian Masalah Sosial**

Masalah sosial merupakan suatu hambatan yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam mewujudkan atau meningkatkan keberfungsian soasial mereka. Masalah sosial tidak bias dilepaskan dari kehidupan sosial masyarakat. Adapun pengertian masalah sosial menurut Soetomo (2015:1) yaitu:

Masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak di inginkan oleh sebagian besar masyarakat. Hal itu disebabkan karena gejala tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma dan standar sosial yang berlaku.

Dari definisi yang dikemukakan diatas, suatu kondisi sosial yang bias dikategorikan sebagai suatu masalah sosial adalah ketika suatu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan,nilai, norma dan standar sosial yang telah disepakati oleh masyarakat. Salah satu kondisi sosial yang tidak diharapkan oleh sebagian besar masyakat yaitu masalah sosial mengenai kemiskinan.

1. **Karakteristik Masalah Sosial**

Suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisi atau keadaan yang terjadi di dalam masyarakat dirasakan oleh banyak orang di dalam lingkungannya, namun dalam hal ini tidak ada Batasan yang secara jelas mengenai berapa jumlah orang yang merasakan masalah, sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah masalah sosial. Berikut karakteristik masalah sosial menurut Soekanto (2013;316) adalah sebagai berikut:

Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada factor-faktor ekonomis, biologis, dan kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai norma yang bersangkut-paut dengan kesejahteraan kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental serta penyesuaian diri individua tau kelompok sosial. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial.

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa masalah sosial timbul dari adanya kekurangan-kekurangan yang ada pada setiap individu maupun kelompok sosial, yang pertama meliputi factor ekonomis. Dimana factor ini erat kaitannya dengan masalah kemiskinan, pengangguran bahkan kriminalitas. Lalu yang kedua faktir biologis, dari factor ini timbul persoalan seperti penyakit syaraf yang berkepanjangan sehingga menimbulkan stress bagi penderitanya bahkan yang lebih buruk bias beujung pada percobaan bunuh diri. Sementara persoalan lain yang menyangkut kenakalan remaja, kejahatan, konflik rasial dan keagamaan bersumber para factor kebudayaan masyarakat.

Dalam hal ini masalah sosial bisa terjadi akibat adanya penyimpangan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok yang bersinggungan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, secara keseluruhan karakteristik masalah sosial terjadi akibat kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh setiap individu maupun kelompok sosial yang dipengaruhi oleh factor-faktor diatas.

1. **Tinjauan Tentang Pemberdayaan**
2. **Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan merupakan proses dimana seseorang memperoleh kekuatan, akses dan sumber-sumber pengetahuan dan keterampilan. Dalam pemberdayaan terdapat pelatihan, pembinanaan serta pengembangan potensi kemandirian yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau masyarakat agar dapat berdayaguna. Adapun pengertian pemberdayaan menurut Djohani, (2003) yang dikutip dalam Anwas (2014;49) Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Selanjutnya Craig dam Mayo (1995;50) dikutip dalam Huraerah (2009;82) mengatakan bahwa: “Konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep-konsep; kemandirian (*self-help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*), pemerataan (*equity*). Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, masyarakat sangat diharapkan untuk mencapai kemandirian sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki agar dapat menjalankan kehidupannya secara mandiri.

1. **Proses Pemberdayaan Masyarakat**

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:

1. Mengidentifikasi dan mnegkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. Proses ini meliputi:
2. Persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya;
3. Persiapan penyelenggaran pertemuan ;
4. Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan;
5. Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.
6. Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian, meliputi:
7. Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah;
8. Identifikasi alternative pemecahan masalah;
9. Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah;
10. Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.
11. Menerapkan rencana kegiatan kelompok: Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitas dari penamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan;
12. Memantau proses da hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (*participatory monitoring and evaluation*/PME). PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengna tujuannya. PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik *prosesnya* (pelaksanaan) maupun *hasil dan dampaknya*  agar dapat disusun proses perbaikan kalua diperlukan.
13. **Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat**

Pendekatan masyarakat menurut Axinn (1998) yang dikutip dalam Mardikanto dan Soebianto (2013;159) bahwa pendekatan sebagai suatu “gaya” yang harus menentukan dan harus diikuti oleh semua pihak dalam system yang bersangkutan (*the style of action within a system)*. Pendekatan ibarat bunyi kendang yang harus diikuti penabuh gamelan dan penarinya. Terkait dengan kegiatan pemberdayaan, Nagel (1997) yang dikutip dalam Mardikanto dan Soebianto (2013;159) mengemukakan bahwa, apapun pendekatan yang akan diterapkan, harus memperhatikan:

1. Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pemberdayaan;
2. Sistem transfer teknologi yang akan dilakukan;
3. Pengembangan sumberdaya manusia/fasilitator yang akan melakukan pemberdayaan;
4. Alternatif organisasi pemberdayaan yang akan diterapkan, yang berhadapan dengan pilihan-pilihan antara:
5. Publik ataukah swasta;
6. Pemerintah ataukah non-pemerintah;
7. Dari atas (birokratis) ataukah dari bawah (partisipatip);
8. Mencari keuntungan ataukah non-profit
9. Karitatip ataukah harus mengembalikan biaya;
10. Umum atau sectoral;
11. Multi-tujuan ataukah tujuan-tunggal;
12. Transfer teknologi ataukah berorientasi pada kebutuhan.

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien (penerima manfaat) dengan sumber atau system lain diluar dirinya. Oleh karenanya, dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: *mikro, mezzo, dan makro*.

1. Pendekatan Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien (penerima manfaat) secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management,* dan *crisis intervention*. Tujuan utuamanya adalah membimbing atau melatih klien (penerima manfaat) dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai *Pendekatan yang Berpusat pada Tugas* (*task centered approach*).

1. Pendekatan Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien (penerima manfaat). Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien (penerima manfaat) agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

1. Pendekatan Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai *Strategi Sistem Besar (large system strategy,* karena penerima manfaat perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen, konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Pendekatan ini memandang klien (penerima manfaat) sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

1. **Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan dengan langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainnya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki, oleh karena itu, pengertian strategi sering rancu dengan: metoda, Teknik, atau taktik.

Tentang hal ini, secara konseptual, strategi sering diartikan dengan beragam pendekatan, seperti:

1. Strategi sebagai suatu rencana

Sebagai suatu rencana, strategi merupakan pedoman atau acuan yang dijadikan pelaksanaan kegiatan, demi tercapainya tujuan-tujuanyang ditetapkan. Dalam hubungan ini, rumusan strategi senantiasa memperhatikan *kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal* yang dilakukan oleh (para) pesaingnya.

1. Strategi sebagai kegiatan

Sebagai suatu kegiatan, strategi merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi, atau perusahaan untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau telah ditetapkan.

1. Strategi sebagai suatu instrument

Sebagai suatu instrument, strategi merupakan alat yang digunakan oleh semua unsur pimpinan organisasi/perusahaan, terutama manager puncak, sebagai pedoman sekaligus alat pengendali pelaksanaan kegiatan

1. Strategi sebagai suatu sistem

Strategi sebagai suatu sistem, strategi merupakan suatu kesatuan rencana dan tindakan-tindakan yang komprehensif dan terpadu yang diarahkan untuk menghadapi tantangan-tantangan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Strategi sebagai pola piker

Sebagai pola pikir, strategi merupakan suatu tindakan yang dilandasi oleh wawasan yang luas tentang keadaan internal maupun eksternal untuk rentang waktu yang tidak pendek serta kemampuan pengambilan keputusan untuk memilih alternatif-alternatif terbaik yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada, yang dibarengi dengan upaya-upaya untuk “menutup” kelemahan-kelemahan una mengantisipasi atau meminimumkan ancaman-ancamannya.

Dari pemahaman tentang beragam pengertian tentang “strategi” diatas, dapat disimpulkan bahwa apapun pengertian yang akan diberikan strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang “penting” yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pegendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan. Strategi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu: ***Pertama,*** pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. ***Kedua***, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat. ***Ketiga,*** modernisasi melaui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk didalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Menyususn instrument pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yang ada, dari hasil temuan dari pengamatan-lapang
2. Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat
3. Mempersiapkan system informasi, mengembangkan system analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.

Adapun strategi pemberdayaan menurut Priyono (1996) yang dikutp dalam Mardikanto dan Soebianto (2013;170) menetapkan adanya 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari:

1. Pengembangan sumberdaya manusia;
2. Penngembangan kelembagaan kelompok;
3. Pemupukan modal masyarakat (swasta)
4. Pengembangan usaha produktif
5. Penyediaan informasi.
6. **Indikator dan Pengukuran Pemberdayaan Masyarakat**
7. Indikator keberdayaan masyarakat

Agar para fasilitator mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui berbagai indicator yang dapat menunjukan seseorang itu berdaya atau tidak, sehingga ketika pendampingan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari penerima manfaat perubahan (keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley yang dikutip dalam Mardikanto dan Soebianto (2013;289) mengembangkan beberapa indicator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga,. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian;
2. Kemampuan membeli komoditas “*kecil*”: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minya tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengna menggunakan uangnya sendiri;
3. Kemampuan membeli komoditas “*besar*”: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indicator diatas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri;
4. Terlibat dalam kegiatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk diternak, memperoleh kredit usaha;
5. Kebebasan relative dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa izinnya;
6. Kesadaran hukum dan pilitik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris;
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap “*berdaya*” jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah;
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangan.

Adapun indikator pemberdayaan masyarakat menurut Kartasasmita (1997) yang dikutp dalam Mardikanto dan Soebianto (2013;290) mengemukakan bahwa untuk mengetahui seberapa jauh pemberdayaan masyarakat telah berhasil, perlu pemantauan dan penetapan sasaran, sejauh mungkin yang dapat diukur untuk dapat dibandingkan.

Pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya berpusat pada bidang ekonomi, karena sasaran utamanya adalah memandirikan masyarakat, dimana peran ekonomi teramat penting. Cara mengukurnya telah banyak berkembang, seperti yang antara lain disebut diatas indeks *Gini,* jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan, jumlah desa miskin, peranan industry kecil, nilai-tukar pertanian.

Pembangunan manusia yang berkualitas bukan hanya menyangkut aspek ekonominya, tetapi juga sisi lainnya, yaitu pendidikan dan kesehatannya. Di bidang ini, juga telah banyak ukuran dikembangkan antara lain persentase penduduk yang buka aksara, angka partisipasi sekolah untuk SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, persentase penduduk yang kurang gizi, dan rata-rata umur harapan hidup. Selain itu juga sedang dikembangkan pleh bappenas bersama BPS semacam angka indeks kesejahteraan rakyat yang menggabungkan indicator ekonomi, kesehatan, dan pendidikan ke dalam angka indeks. Di dunia internasional indeks kesejahteraan semacam in telah dikembangkan oleh UNDP yang dikenal dengan nama *Human Development Index* (HDI) seperti telah dikemukakan di atas. Adapun teori menurut soeharto (2004) yang dikutip dalam Mardikanto dan Soebianto (2013;291) terkait dengan pemberdayaan masyarakat, keberhasilannya dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahtreraan, dan kemampuan kultural dan politis jenis.

1. Skala Pengukuran

Sebagaimana diketahui, di dalam statistika dikenal adanya empat macam skala pengukuran, yaitu: *skala nominal, ordinal, interval,* dan *rasio*; yang seringkali juga hanya dibagi menjadi 2 yaitu *skala interval* (*interval* dan *rasio*) dan *skala cardinal* (*nominal dan ordinal*). Berkaitan dengan hal ini, di dalam evaluasi program pemberdayaan, *skala interval* hanya dapat diterapkan untuk mengukur tingkat produktivitas dan pendapatan masyarakat. Tetapi, untuk pengukuran perubahan perilaku (tingkat adopsi) hanya dapat menggunakan *skala cardinal* (paling tinggi *ordinal*). Hal ini, disebabkan karena baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sulit diukur dengan menggunakan *skala interval,* apalagi dengan *skala rasio*.

1. **Konsep Tentang Kemandirian**
2. **Pengertian Kemandirian**

Kemandirian merupakan kemampuan dalam mengelola diri sendiri, ini ditandai dengan kemampuannya untuk tidak bergantung kepada dukungan emosional orang lain terutama orang tua, mampu mengambil keputusan secara dan mampu menrima akibat dari keputusan tersebut, serta memiliki seperangkat prisip tentang benar dan salah serta penting dan tidak penting bukan berarti tidak memerlukan orang lain, tetapi tetap memerlukan orang lain dan bimbingan dari orang lain dengan tingkat ketergantungan yang rendah. Selain itu kemandirian juga merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki para remaja demi menciptakan kehidupan yang baik. Adapun pengertian kemandirian menurut Ali dan Asrori (2014:107), yaitu:

Kemandirian merupakan kemampuan melepaskan diri secara emosional terhadap orang lain terutama orang tua, mampu mengambil keputusan sendiri dan konsisten kepada keputusannya tersebut, dan bertingkah laku sesuai nilai yang berlaku di lingkungannya.

Dari definisi tersebut menegaskan bahwa kemandirian ialah kemampuan seseorang dalam melepaskan diri secara emosional atau tidak tergantung pada orang lain serta mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab keputusan dan tingkah lakunya sendiri. Sedangkan pengertian kemandirian menurut Maslow (1971) dalam Ali dan Asrori (2017:111) membedakan kemandirian menjadi dua, yaitu:

Kemandirian aman adalah kekuatan untuk menumbuhkan cinta kasih pada dunia, kehidupan, dan orang lain, sadar akan tanggung jawab bersama, dan tumbuh rasa percaya terhadap kehidupan. Kekuatan ini digunakan untuk mencintai kehidupan dan membantu orang lain. Sedangkan kemandirian tidak aman adalah kekuatan kepribadian yang dinyatakan dalam perilaku menentan dunia.

Kemandirian aman dan tidak aman jelas sangat berbeda seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa kemandirian memiliki manfaat menumbuhkan cinta kasih sayang pada dunia dan dapat membantu orang-orang di lingkungannya. Sedangkan kemandirian tidak aman lebih bersifat menentang dan tidak peduli dengan masyarakat di sekitarnya atau bisa disebut dengan kemandirian mementingkan diri sendiri.

1. **Aspek-aspek kemandirian**

Pentingnya usaha mempersiapkan bagi masa depan remaja, karena sedang mencari jati diri, mereka juga berada pada tahap perkembangan yang sangat potensial. Potensi-potensi yang ada pada remaja harus kita kembangkan agar mereka dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Adapun bentuk-bentuk kemandirian menurut Robert Hivighurst (1972) dalam Desmita (2016:186) membedakan kemandirian atas tiga bentuk kemandirian, yaitu:

1. Kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi pada orang lain.
2. Kemnadirian ekonomi, yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak ketergantungannya kebutuhan ekonomi pada orang lain.
3. Kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.
4. Kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain.

Sementara itu, Steinberg (1993) dalam Desmita (2016:186) membedakan karakteristik kemandirian atas tiga bentuk, yaitu: 1). Kemandirian emosional (*emotional autonomy*); 2). Kemandirian tingkah laku (*Behavioral autonomy*); 3). Kemandirian nilai (*Value autonomy*). Lengkapnya, Steinberg menulis:

*The first emotional autonomy-that aspect of independence relate to changes in the individual’s close relationship, especially with parent. The second behavioral autonomy-the capacity to make independent decision and follow through with them. The third characterization involves unaspect of independence reffered to as value autonomy-wich is more than simply being able to resist pressures to go along with the demands of other; it means having a set a principles about right and wrong, about what is important and what is not.*

Kutipan diatas menunjukkan karakteristik dari ketiga aspek kemandirian, yaitu:

1. Kemandirian emosional, yaitu aspek kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu, seperti hubungan emosiaonal peserta didik dengan guru atau dengan orangtuanya.
2. Kemandirian tingkah laku, yaitu suatu kemampuan untuk membuat keputusam-keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab.
3. Kemandirian yang lain, yaitu kemampuan memaknai seperangkat prinsip tetang benar dan salah, tentang apa yang penting dan apa yang tidak penting.

Pembahasan mengenai aspek-aspek kemandirian diatas pada suatu intisari bahwa kemandirian merupakan suatu kekuatan internal individu yang diperoleh melalui proses inividualisasi. Proses individualisasi merupakan proses realisasi dan proses menuju kesempurnaan, sehingga individu bisa mencapai tingkat kemandiriannya.